

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Abdul Aziz Hakim. (2011). Negara Hukum dan Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Afan Gaffar. (2005). Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amiruddin & Zainal A. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. (2011). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Asyim Riyanto. (2000). Teori Konstitusi. Bandung: Yapemdo.
- Azhary, H.M.T. (2015). Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam. Prenada Media.
- Bagir Manan. (1995). Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara. Bandung: Mandar Maju.
- Budiarjo, Miriam. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dahlan Thaib, dkk. (2003). Teori dan Hukum Konstitusi. Jakarta: Rajawali.
- Isharyanto. (2016). Konstitusi dan Perubahan Konstitusi. Surakarta: Pustaka Hanif.
- Isharyanto., Prasetyo, Dila. (2016). Hukum Pemerintahan Desa. Bantul: Absolute Media.
- Miriam Budiardjo. (1982). Masalah Kenegaraan. Jakarta: Gramedia.

Moh. Mahfud MD. (1999). Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi. Yogyakarta: Gama Media.

Ni'matul Huda. (2005). Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review. Yogyakarta: UII Press.

Peter Mahmud Marzuki. (2014). Penelitian Hukum (Edisi Revisi) Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Raharjo, M. M. (2011). Kepemimpinan Kepala Desa. Jakarta: Bumi Aksara.

Sri Soemantri M. (1993). Susunan Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 dalam Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia. Jakarta: Sinar Harapan.

Sudargo Gautama. (1983). Pengertian tentang Negara Hukum. Bandung: Alumni.

Widjaja, HAW. (2003). Pemerintahan Desa/Marga. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

b. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6914)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 5539)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6619)

Putusan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XIX/2021

c. Jurnal

Ayu, G., & Parsa, W. (2023). Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Aspek Konstitusionalisme dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal Kertha Semaya*, 12(3).
<https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i03.p07>

Dendi, D., Yarisman, L., & Sinaga, S. (2022). Analisis Isu Penambahan Masa Jabatan Presiden Dalam Perspektif Negara Hukum Demokrasi. *Samudera Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.31629/samuderahukum.v1i1.5096>

Hariri, A. (2020). *The Politics Of Law Concerning The Tenure Of Village Head Reviewed From The Constitualism Perspective*. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 5(1). <https://doi.org/10.22373/petita.v5i1.71>

Iswari, F. (2020). Aplikasi Konsep Negara Hukum dan Demokrasi dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. *JCH: Jurnal Cendekia Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.3376/jch.v6i1.285>

- Luthfy, Riza Multazam. (2019). Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Konstitusi. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 48(4).
<https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.319-330>.
- Maslul, S. M. (2022). Konstruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021. *Jurnal Literasi Hukum*, 6(2). <http://dx.doi.org/10.31002/lh.v6i2.6814>
- Pambudi, H. (2023). Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme. *Wijaya Putra Law Review*, 2(1).
<https://doi.org/10.38156/wplr.v2i1.82>
- Pamungkas, Bambang Adhi. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal USM Law Review*, 2(2).
<http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2271>
- Pariangu, U., & Elwan, L. (2023). Ancaman Terhadap Demokratisasi Desa Di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa. *Journal Publicho*, 6(3).
<https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.213>
- Prabowo, Y., Hafizar, A., & Kafandi, M. A. (2023). Menakar Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Demokratis. *Jurnal Darma Agung*. 31(4).
<https://doi.org/10.46930/ojsuda.v31i4.3258>
- Pratiwi, F., & Wardana, D. (2023). Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Konsep Hukum Tata Negara. *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(2).
<http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i2>.

- Suharmartha, S., Syamsir, & Eriton. (2023). Analisis Pengaturan Periode Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Tentang Desa. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 3(2). <https://doi.org/10.22437/limbago.v3i2.24165>
- Syafriadi. (2019). Hubungan Konstitusi dan Negara Dalam Paham Konstitusionalisme. *UIR Law Review*, 03(2). [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2019.vol3\(02\).4558](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2019.vol3(02).4558)
- Warsudin, D., & Hamid, H. (2023). Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum dan Demokrasi. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(1). <https://doi.org/10.31604/jips.v10i1>

d. Lain-lain

- Anggraini, F. (2023, 11 Juli). Revisi UU Desa Disepakati Jadi RUU Inisiatif DPR. *news.detik.com*. URL: <https://news.detik.com/berita/d-6817152/revisi-uu-des-a-disepakati-jadi-ruu-inisiatif-dpr> (Diakses pada 14 Oktober 2023)
- Aditya, N. Prabowo, D. (2023, 05 Desember). Presiden Tunjuk Wakil Pemerintah untuk Bahas Revisi UU Desa bersama DPR. *news.detik.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/05/11235611/presiden-tunjuk-wakil-pemerintah-untuk-bahas-revisi-uu-des-a-bersama-dpr> (Diakses pada 7 Juni 2024)
- Aquinaldo, A. (2023, 10 Juli). Masa Jabatan di Perpanjang 9 Tahun, Kepala Desa di Sikka Mengaku akan Ada Kejenuhan Memimpin Desa. *flores.tribunnews.com*. <https://flores.tribunnews.com/2023/07/10/masa>

[jabatan-di-perpanjang-9-tahun-Kepala_Desa-di-sikka-mengaku-akan-ada-kejenuhan-memimpikan-desa](#) (Diakses pada 27 Mei 2024)

Azzahra, T. (2024, 02 Mei). “Jokowi Teken UU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa 8 Tahun dan Bisa 2 Periode”. news.detik.com. URL: https://news.detik.com/berita/d-7321229/jokowi-teken-uu-desa-masa-jabatan-Kepala_Desa-8-tahun-dan-bisa-2-periode (Diakses pada 7 Juni 2024)

Badan Legislasi. DPR RI. (2023, 3 Juli). Baleg setuju RUU Desa jadi inisiatif DPR.dpr.go.id. URL: <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45309/t/Baleg%20setujui%20RUU%20Desa%20jadi%20inisiatif%20DPR> (Diakses pada 14 Oktober 2023)

CNBC Indonesia. (2023, 18 Juli). Banyak Uang, Tapi Orang Miskin Desa Lebih Banyak dari Kota!. cnbc.indonesia.com. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230718063532-4-455178/banjir-uang-tapi-orang-miskin-desa-lebih-banyak-dari-kota> (Diakses pada 13 Desember 2023)

Dirgantara, A. Meiliana, D. (2023, 17 Januari). Kepala Desa Demo di DPR Tuntut Masa Jabatan jadi 9 Ditemui Pimpinan DPR. nasional.kompas.com. URL: https://nasional.kompas.com/read/2023/01/17/11363921/Kepala_Desa-demo-di-dpr-tuntut-masa-jabatan-jadi-9-tahun-ditemui-pimpinan-dpr (Diakses pada 13 Desember 2023)

DPR RI. (2024, 28 Maret). Tok! DPR Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU. dpr.go.id.<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/49059/t/Tok!%20DPR%20>

[Resmi%20Sahkan%20RUU%20Desa%20Menjadi%20UU](#) (Diakses pada 7 Juni 2024)

Hidayat, R. (2023, 27 Januari). ICW Beberkan Tiga Masalah Mendasar dalam Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa. hukumonline.com. URL: <https://www.hukumonline.com/berita/a/icw-beberkan-tiga-masalah-mendasar-dalam-perpanjangan-masa-jabatan-kepala-desa-lt63d3a4911fe68> (Diakses pada 11 Desember 2023)

Khoirunnisaa, J. (2023, 07 Desember). Bamsuet Wanti-wanti Kepala Desa Titik Rawan Penyalahgunaan Dana Desa. news.detik.com. URL: <https://news.detik.com/berita/d-7077842/bamsuet-wanti-wanti-Kepala-Desa-titik-rawan-penyalahgunaan-dana-desa> (Diakses pada 13 Desember 2023)

Rizki, M. (2023, 24 Januari). Menyoroti Risiko Korupsi Tingkat Pejabat Kepala Desa. hukumonline.com. URL: <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoroti-risiko-korupsi-tingkat-pejabat-kepala-desa-lt63cfa628e89cb> (Diakses pada 11 Desember 2023)